

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman, L., 1991, *Ensiklopdi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Amrani, Hanafi, 2021, *Hukum Pidana Ekonomi*, UII Press, Sleman.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Arifin, Zainal Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Darmadji, Tjiptono, dan Hendy Fakhruddin, 2001, *Pasar Modal di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Fabozzi, Frank J. dan Pamela Peterson Drake, 2009, *Capital Markets, Financial Management, and Investment Management*, John Wiley & Sons, New Jersey, 2009.
- Fuady, Munir, 1996, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Citra Aditya, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 1966, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasaruddin, Irsan, 2014, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 1999, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.

Ness, Daniel W. Van dan Karen Heetderks Strong, 2015, *Restorative Justice: An Introduction to Restorative Justice, Five Edition*, Taylor and Francis, Abingdon (UK).

Otoritas Jasa Keuangan, 2023, *Buku Saku Pasar Modal*, Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal, Jakarta.

Poernomo, Bambang, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia indonesia, Jakarta.

Qamariyanti, Tavinayati Yulia, 2009, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rahmah, Mas, 2019, *Hukum Pasar Modal*, Kencana, Jakarta.

Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Saebani, Beni A., 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

Safitri, Indra, 1998, *Transparansi Independensi dan Pengawasan Kejahatan Pasar Modal*, Safitri & Co GO, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sumardjono, Maria S.W., 1996, *Pedoman Usulan Penelitian*, Gramedia, Jakarta.

Tanjung, Irzan, 1992, *Peran Pemerintah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal Sehubungan Dengan Usaha Pemerataan Pendapatan*, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2022, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wiradipradja, E. Saefullah, 2016, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Cetakan Ke-2*, Keni Media, Bandung.

Zainal Abidin, Andi dan Andi Hamzah, 2012, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta.

## **B. Jurnal**

Amir, Muhammad Fakhri, “Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)”, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 5, No. 1, 2020.

Attijani, Mohammad Solehodin, “Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Bagi Investor Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal”. *Jurnal Media Iuris*, Volume 8, Nomor 2, 2019.

Balfas, M. Hamud, “Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan di Bursa”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 6, No. 11, Juni 1999.

Bremer, Emily S., “The Unwritten Administrative Constitution”, *Florida Law Review Journal*, Volume 66, Nomor 3, 2015.

Elman, Philip, “A Note on Administrative Adjudication”, *The Yale Law Journal Volume*, Volume 74 Nomor 4, 1965.

Epstein, Richard A., “The Role of Guidances in Modern Administrative Procedure: The Case for De Novo Review”, *Journal of Legal Analysis*, Volume 8 Nomor 1, 2016.

Hariyanto, Diah Ratna Sari dan Pande Yogantara S, “Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia”, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 13 No 1, 2019.

Heriyadi, Hengki, “Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.11, No.1, April 2023.

Hiariej, Eddy O.S., “Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak”, *Jurnal Penulisan Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 11 Maret 2021.

Marihot, Janpieter H., “Landasan Filosofis Pengaturan Pasar Modal di Indonesia:Harapan dan Kenyataan”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2015.

Muladi, "Implementasi Pendekatan "Restorative Justice" Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana UN DIP*, Vol. 2, No. 2, 2019.

Prayitno, Vicky, "Studi Kasus Tindak Pidana Pasar Modal Pada PT. Reliance Securities, Tbk dan PT Magnus Capital", *Jurnal Dharmasisy Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 2, No. 2, Juni 2022.

Sinaga, Dwi Natal Ngai Santoso, *et. al.*, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Weyembergh, Anne dan Nicolas Joncheray. "Punitive Administrative Sanctions And Procedural Safeguards: A Blurred Picture that Needs to be Addressed". *New Journal of European Criminal Law*, Vol. 7, No. 2, 2016.

Wai, U., & Patrick, H., "Stock and Bond Issues and Capital Markets in Less Developed Countries". *Palgrave Macmillan Journals*, Vol. 20, No.2. 1973.

### **C. Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6849).

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5785).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2018 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6287).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 49/OJK).

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif.

#### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XII/2023 perihal Pengujian Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 365/G/2023/PTUN.JKT atas nama Penggugat Andreas Sugihardjo Tjendana dan Tergugat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 373/G/2023/PTUN.JKT atas nama Penggugat Radianto Kusumo dan Tergugat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 436/G/2023/PTUN.JKT atas nama Penggugat Deddy Suganda Widjaja dan Tergugat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT atas nama Penggugat Margaretha Undarsa dan Tergugat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 559/G/2023/PTUN.JKT atas nama Penggugat Yeni Ariyanti dan Tergugat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

## E. Internet

Al-Athos, Baqir Idrus, Antara News, “OJK beri sanksi administratif untuk 165 pihak di pasar modal pada 2023” <https://www.antaraneews.com/berita/3907092/ojk-beri-sanksi-administratif-untuk-165-pihak-di-pasar-modal-pada-2023>, diunggah pada 9 Januari 2023, diakses pada 21 Januari 2024.

Antonius Hari (Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal OJK) dalam Webinar yang berjudul “Mengenal Lebih Jauh Penagaturan UU P2SK dalam Rangka Pengautan Sektor Pasar Modal”, 20 Juli 2023 melalui <https://www.youtube.com/watch?v=ouggVQ-Aehk>, diakses 24 Februari 2024, Otoritas Jasa Keuangan.

Billiet, Carole M. 2017. Administrative Sanctioning Systems in the EU Member States: A General Overview”, [www.aeaj.org](http://www.aeaj.org). AEAJ Workshop in Riga, Latvia. 7-8 September. <http://www.aeaj.org/media/files/2017-11-25-58-AEAJ%20Riga%20Administrative%20sanctions.pdf>. Diakses 1 Maret 2024.

Koning, François, “The Act of 20 September 2012 Establishes The “Una Via” Principle in The Prosecution of Violations of The Tax Legislation and Increases The Criminal Tax Fine”, <https://www.eubelius.com/en/news/a-new-attempt-at-uniform-prosecution-of-tax-fraud>, diakses pada 08 Februari 2024.

Lazarski, Christopher, 2012, Power Tends To Corrupt: Lord Acton’s Study of Liberty. Cornell University Press, 2012. <http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctv177tck0> diakses 16 Juli 2024.

Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers: Sektor Jasa Keuangan Terjaga Stabil dalam Menghadapi Era Suku Bunga Global Tinggi untuk Waktu

Lebih Lama (Higher for Longer)”, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Sektor-Jasa-Keuangan-Terjaga-Stabil-dalam-Menghadapi-Era-Suku-Bunga-Global-Tinggi-untuk-Waktu-Lebih-Lama/Siaran%20Pers%20RDKB%20September%202023%20Okt%20209.psf> diakses pada 21 Januari 2024.

Reqnews.com, Mengenal UNA-VIA Dalam Hukum Tata Usaha Negara, <https://www.reqnews.com/read/fokus/61592/mengenal-unavia-dalam-hukum-tata-usaha-negara>, diunggah pada 06 Maret 2023, diakses 07 Februari 2024. pada 7 Mei 2023.

## F. Lain-Lain

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) versi 6 Juli 2022, Pusat PUU Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI diakses pada 4 Januari 2024.

Hartanto, Ratna, “The Una Via Principle: New Effective Regulation in Indonesian Capital Market Case Resolution” dalam *Proceedings of the International Conference On Law, Economic & Good Governance* [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7\\_97](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7_97), 2024, Atlantis Press.

## G. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Achjani Z, Eva, 2009, “Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana)”, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Muhammad Fatahillah Akbar, 2024, *Reformulasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rogier Lodewijk J. J., 1992. Strafsancties Administratieve Sancties En Het Una Via-Beginsel (Penal Sanctions Administrative Sanctions and the Una Via Principle), *Dissertation*, Erasmus University Rotterdam.

Septri Andri Mangara Tua, 2023, Penerapan Keadilan Restoratif Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Pasar Modal, *Thesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Siti Shalima Safitri, 2023, Relevansi Prinsip Una Via dengan Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.